

ABSTRAK

Norman Christian Nusantara (01659210031)

KEDUDUKAN SITA EKSEKUSI PERDATA YANG DIJADIKAN OBJEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada Perkara Perdata, Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi tersebut juga berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berperkara Putusan Pengadilan tersebut secara khusus yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya harus dilaksanakan eksekusinya dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara dan putusan tersebut yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Perkara tersebut berawal ketika ahli waris alm. A. Supandi menggugat PT. Pertamina (Persero) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang singkatnya dimenangkan oleh ahli waris alm. A. Supandi sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekusinya telah dijalankan. Akan tetapi terdapat laporan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang melaporkan ahli waris alm. A. Supandi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan sita eksekusi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan konseptual, yang menghasilkan analisis bahwa eksekusi dalam perkara perdata, tidak dapat dicampuri dengan urusan pidana dan tidak bisa dijadikan objek penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila terjadi kegagalan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata tersebut, dapat melakukan upaya hukum perlawanan. Tak lupa penulis juga memberi saran bahwa perlu adanya suatu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum khususnya dalam hal penegakkan hukum bagi pemerintah aparat penegak hukum agar menjadi contoh guna terciptanya suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Referensi: 43 (1945-2021)

Kata kunci: eksekusi, tindak pidana korupsi, putusan perdata, berkekuatan hukum tetap

ABSTRACT

Norman Christian Nusantara (01659210031)

STATUS OF CIVIL EXECUTION SEIZATIONS THAT ARE THE OBJECT OF CORRUPTION CRIMINAL INVESTIGATION

In Civil Cases, the Court's Decision or Jurisprudence also applies as law for the parties to the case. The Court's Decision specifically, which has permanent legal force, must then be executed and is an act of coercion against the losing party in the case and the decision which is have executive powers. The case started when the heir of the late. A. Supandi sued PT. Pertamina (Persero) with an Unlawful Act lawsuit which in short was won by the heirs of the late. A. Supandi has reached the Judicial Review (PK) level so that it has obtained permanent legal force and its execution has been carried out. However, there was a report to the DKI Jakarta High Court which reported the heirs of the late. A. Supandi who is suspected of committing a criminal act of corruption during the confiscation of the execution of the decision. This study uses a normative-empirical research type, with a conceptual approach, which produces an analysis that execution in civil cases cannot be interfered with criminal matters and cannot be used as an object of investigation into criminal acts of corruption. If there are irregularities in the implementation of the civil decision execution, legal action can be taken against it. Not to forget, the author also suggests that there needs to be an effort made to increase legal awareness, especially in terms of law enforcement for the government of law enforcement officials so that it becomes an example to create an order in society..

References: 43 (1945-2021)

Keywords: execution, corruption crime, civil verdict, legally binding